



Peran Pemerintah Nagari dalam Mensukseskan Program Unggulan Bupati Satu Nagari Satu Event

(Studi Kasus Baluluak Bajarami di Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar)

Fauzia Rahma^{1*}, Zulfina Adriani², Try Syeftiani³

¹⁻³Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis korespondensi: fauziahrahmah774@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the role of the Village Government in making the Regent's Flagship Program One Village One Event a success through a case study of Baluluak Bajarami in Kumango Village, Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency. This study uses Soerjono Soekanto's role theory (2013, cited in Mawarni et al., 2024) with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation studies, then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions according to Miles and Huberman. The results show that in the active role aspect, the Village Government acts as a figure and leader who carries out socialization, education, coordination, and controls and monitors each stage of the event. In the participatory role aspect, the contribution of human resources, materials, time, and the level of community participation in the implementation of activities is seen. Meanwhile, the passive role aspect is reflected in the attitude of the Village Government that values initiatives, is open to other opinions, and values every input for the sustainability of the event. The main supporting factors come from local cultural values, local government support, and community and migrant participation, while inhibiting factors include budget limitations. Therefore, strengthening coordination and sustainability strategies are necessary to ensure the event's optimal impact in the future.*

Keywords: *Community Participation; Cultural Event; Local Government Role; Nagari Governance; One Village One Event Program.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Nagari dalam mensukseskan Program Unggulan Bupati Satu Nagari Satu Event melalui studi kasus Baluluak Bajarami di Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Kajian ini menggunakan teori peran Soerjono Soekanto (2013, dikutip dalam Mawarni et al., 2024) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek peran aktif, Pemerintah Nagari berperan sebagai tokoh dan pemimpin yang melakukan sosialisasi, edukasi, koordinasi, serta mengendalikan dan memantau setiap tahapan event. Pada aspek peran partisipatif, terlihat kontribusi sumber daya manusia, material, waktu, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, aspek peran pasif tercermin melalui sikap Pemerintah Nagari yang menghargai inisiatif, terbuka terhadap pendapat lain, dan menghargai setiap masukan demi keberlanjutan event. Faktor pendukung utama berasal dari nilai budaya lokal, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dan perantau, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan strategi keberlanjutan agar event dapat memberikan dampak yang lebih optimal di masa mendatang.

Kata Kunci: Event Budaya Lokal; Partisipasi Masyarakat; Pemerintahan Nagari; Peran Pemerintah; Program Satu Nagari Satu Event.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menekankan pada keterlibatan masyarakat bersama pemerintah daerah. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah pembangunan berbasis kearifan lokal, yang menempatkan budaya, tradisi, dan potensi masyarakat sebagai pilar utama. Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan nagari. Nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Provinsi

Sumatera Barat memiliki kedudukan strategis dalam menggerakkan pembangunan daerah. Pemerintah nagari tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara administrasi, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi masyarakat, pelestari budaya, serta fasilitator pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, peran pemerintah nagari sangat menentukan keberhasilan program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah kabupaten.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan nagari maju dan mandiri adalah melalui Satu Nagari Satu Event. Nagari Kumango salah satu nagari yang melaksanakan event tersebut dengan kegiatan Baluluak Bajarami di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Event tersebut sebagai manifestasi kultural unik serta program unggulan yang menggambarkan filosofi hidup masyarakat agraris Minangkabau. Baluluak Bajarami memiliki makna simbolis lebih dari sekadar kegiatan seni dan budaya. Baluluak merujuk pada proses pengolahan lahan persawahan untuk menghasilkan lumpur yang subur sebagai syarat keberhasilan panen, yang merepresentasikan nilai kerja keras, persiapan matang, serta perjuangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan pendidikan generasi penerus (Admin, 2022).

Pelaksanaan Baluluak Bajarami merepresentasikan integrasi antara elemen sosio-kultural dan potensi ekonomi lokal. Rangkaian kegiatan yang meliputi pawai budaya, demonstrasi pertanian tradisional (manyabik jo mairiak padi), festival seni bela diri (silek kumango dan silek baluluak), atraksi kuliner tradisional (malatuah karupuak jangek), permainan tradisional (main alang-alang), pertunjukan kesenian, pameran kuliner, dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), lomba busana tradisional (lomba baju kuruang basiba), lomba fotografi, serta beragam permainan anak nagari. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya komprehensif dalam melestarikan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal. Apresiasi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan para perantau memperlihatkan pengakuan terhadap signifikansi festival ini dalam memperluas citra Nagari Kumango serta memperkenalkan kekayaan adat, budaya, dan kuliner khas nagari (Bagian Humas dan Protokol, 2023).

Berdasarkan data perkembangan Festival Baluluak Bajarami menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang sangat signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai transaksi tercatat sebesar Rp 270.000.000 dengan 5.000 pengunjung, dan meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi Rp2.000.960.000 dengan jumlah pengunjung mencapai 12.506 orang. Lonjakan ini mengindikasikan bahwa festival tidak hanya menjadi ajang promosi budaya, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberhasilan event tidak dapat dipisahkan dari peran Pemerintah Nagari Kumango

yang menjalankan fungsi pengorganisasian, fasilitasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Program Unggulan Bupati Satu Nagari Satu Event. Pemerintah nagari mampu menggerakkan pemuda, UMKM, tokoh adat, serta elemen masyarakat lainnya untuk terlibat secara kolaboratif sehingga festival memiliki daya tarik yang lebih kuat. Dengan demikian, peningkatan transaksi ekonomi dan kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa optimalisasi peran pemerintah nagari berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi lokal dan menjaga keberlanjutan event sebagai agenda unggulan daerah.

Sebagai lembaga pemerintah, nagari memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program pembangunan nagari. Pemerintah nagari tidak hanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan event dalam Program Satu Nagari Satu Event, tetapi juga bertanggung jawab untuk mobilisasi sumber daya, mendorong partisipasi masyarakat, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Peran pemerintah nagari sangat krusial untuk mengoptimalkan potensi lokal dan mencapai tujuan program (Indry & Ningsih, 2023). Oleh karena itu, program pembangunan daerah membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah nagari dalam pelaksanaan program unggulan. Selain itu, pemahaman mendalam tentang otonomi dan kewenangan nagari, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjadi esensial dalam menilai kapasitas dan fleksibilitas pemerintah nagari dalam mengelola program unggulan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar secara signifikan memprioritaskan pariwisata sebagai sektor unggulan. Upaya peningkatan promosi, infrastruktur, serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terus dilakukan agar pariwisata dapat mendukung pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Pengembangan pariwisata oleh pemerintah daerah, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bertujuan untuk mencapai otonomi daerah. Sejak diberlakukannya undang-undang ini, pemerintah daerah di seluruh Indonesia giat berbenah, salah satunya dengan mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan potensi daerah melalui strategi yang efektif berpotensi mendorong pembangunan di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal melalui Program Satu Nagari Satu Event, kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi esensial. Hal ini sejalan dengan prinsip kemandirian desa yang tertuang dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 3 Huruf i. Program Satu Nagari Satu Event secara spesifik menerapkan prinsip ini dengan adanya dukungan kebijakan, pendanaan, dan pendampingan teknis dari pemerintah daerah. Sebagai pihak yang krusial di garis depan, pemerintah nagari memiliki tanggung jawab besar untuk merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi event. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan program dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat nagari.

Optimalisasi potensi, Program Satu Nagari Satu Event sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini selaras dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 Huruf a tentang pembangun nagari sesuai dengan potensi, prioritas, dan nilai kearifan lokal. Bupati Kabupaten Tanah Datar menegaskan bahwa Program Unggulan Satu Nagari Satu Event telah memberikan dampak ganda atau multiplier effect yang signifikan bagi masyarakat Tanah Datar. Program ini berfokus pada penggalian dan pelestarian kearifan lokal dan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi selama penyelenggaraan event, tetapi juga menciptakan manfaat jangka panjang di luar periode event. Event ini sukses merevitalisasi kembali tradisi adat istiadat, budaya, dan ragam kuliner tradisional (Inang, 2024).

Bupati Tanah Datar menekankan bahwa melalui program ini, Kabupaten Tanah Datar, sebagai pusat dan cikal bakal Minangkabau yang kaya akan budaya lokal, dapat melestarikan warisan budayanya sekaligus menjadikannya daya tarik utama bagi wisatawan. Wisata budaya ini akan melengkapi keindahan alam Tanah Datar yang luar biasa, sehingga meningkatkan kunjungan wisata ke daerah (Inang, 2024). Potensi lain dari Program Satu Nagari Satu Event adalah kemampuan untuk berpotensi menarik investor dalam mengoptimalkan pendapatan lokal melalui pengembangan produk lokal yang kompetitif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Olivia, 2024) yang mengemukakan bahwa Program Satu Nagari Satu Event dapat menjadi pendapatan masyarakat di tingkat nagari. Secara umum, Program Satu Nagari Satu Event berfungsi untuk mempromosikan potensi wisata dan warisan budaya lokal dan mengangkat tradisi dan kearifan lokal akan menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya.

Dalam visi-misi Bupati Kabupaten Tanah Datar, Satu Nagari Satu Event merupakan salah satu dari sepuluh program unggulan. Program Satu Nagari Satu Event merupakan inisiatif utama bupati di bidang pariwisata. Program ini bertujuan untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya serta mempromosikan kearifan lokal di setiap nagari. Selain itu, adanya event-event ini juga berkontribusi pada pengaktifan kembali sanggar-sanggar di nagari, yang kemudian berfungsi sebagai wadah pertunjukan dan pemicu semangat kreativitas, menggali kearifan lokal, dan stand-stand penjualan yang disediakan selama kegiatan dalam meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan kunjungan wisatawan (Aydini, 2024).

Program unggulan tidak dapat terlaksana tanpa dukungan sumber daya finansial. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten menyalurkan anggaran melalui APBN sebagai bentuk

dukungan nyata. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk penyediaan fasilitas seperti panggung, tenda, transportasi, promosi, serta kebutuhan teknis lainnya. Dukungan dana ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memandang Baluluak Bajarami sekadar sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai event unggulan yang memiliki nilai tambah ekonomi dan pariwisata. Jika ditinjau dari perspektif konstitusi, dukungan pemerintah terhadap kegiatan berbasis potensi daerah sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat ini memberikan dasar hukum bahwa negara berkewajiban mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan nilai tambah dan menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi amanat tersebut adalah dengan mendorong pengembangan industri pariwisata, memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta melestarikan budaya lokal. Upaya ini tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat identitas kearifan lokal sebagai daya tarik pariwisata.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Peran

Menurut (Soekanto, 2019), peran (role) adalah suatu bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada seseorang sesuai dengan kedudukannya. Kedudukan tersebut bersifat dinamis atau dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang di hadapi. Sementara itu, Dewi Wulan Sari (2009, dikutip dalam Raintung et al., 2021) menyatakan bahwa peran mengacu pada gagasan mengenai tindakan yang diharapkan dari individu dalam masyarakat, yang mencakup tuntutan perilaku yang diberikan oleh lingkungan sosial. Kinerja individu dalam peran ini penting untuk menjaga struktur sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Maurice Duverger (2010, dikutip dalam Raintung et al., 2021) yang menegaskan bahwa peran adalah atribut yang berasal dari status serta bagaimana orang lain diharapkan berperilaku terhadap pemegang status.

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola pemerintahan modern yang muncul sebagai jawaban atas keterbatasan pemerintah dalam menghadapi kompleksitas masalah publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut (Emerson et al., 2012) mendefinisikan collaborative governance sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan serta manajemen

kebijakan publik yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam forum bersama, dengan tujuan menghasilkan kesepakatan yang legitimate, implementatif, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai bantuan atau intervensi dari pihak luar, tetapi lebih kepada proses sistematis untuk mendorong masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan.

Pembangunan Lokal Berkelanjutan

Pembangunan lokal berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang. Menurut (Suparmoko, 2020) pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks pembangunan daerah, konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi lokal yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal (Kurniawan et al., 2021). Pembangunan lokal berkelanjutan juga mencakup upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal sebagai bagian integral dari identitas suatu daerah (Rosika et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Wali yang terletak di Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Purposive sampling adalah pengambilan informan secara sengaja melibatkan pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Unggulan Baluluak Bajarami di Nagari Kumango, serta pemahaman terhadap peran pemerintah nagari dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan program. Dalam proses pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Dalam penelitian

ini, menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles & Huberman (1984, dikutip dalam Sugiyono, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Nagari dalam Mensukseskan Program Unggulan Bupati Satu Nagari Satu Event Studi Kasus Baluluak Bajarami di Nagari Kumango?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pembahasan ini menguraikan Peran Pemerintah Nagari dalam Mensukseskan Program Unggulan Bupati Satu Nagari Satu Event Studi Kasus Baluluak Bajarami di Nagari Kumango. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2013, dikutip dalam Mawarni et al., 2024) sebagai dasar analisis. Data yang dianalisis diperoleh melalui metode observasi, wawancara, serta dokumen yang telah dikumpulkan selama penelitian.

Peran Aktif

Berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2013, dikutip dalam Mawarni et al., 2024) peran aktif merupakan bentuk keterlibatan langsung dalam menjalankan fungsi sosial melalui tindakan nyata yang berdampak terhadap perubahan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Nagari Kumango menunjukkan peran aktif dalam mensukseskan Program Unggulan Bupati Satu Nagari Satu Event melalui penyelenggaraan Baluluak Bajarami. Peran aktif tersebut tidak hanya menggambarkan fungsi struktural pemerintah nagari, tetapi juga mencerminkan pola Collaborative Governance sebagaimana dikemukakan oleh (Emerson et al., 2012), di mana struktur pengambilan keputusan serta manajemen kebijakan publik yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam forum bersama, dengan tujuan menghasilkan kesepakatan yang legitimate, implementatif, dan berkelanjutan. Keterlibatan langsung masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan juga menunjukkan adanya proses pemberdayaan masyarakat (Najamudin & Al Fajar, 2024), karena pemerintah memberikan akses, kesempatan, dan pengakuan terhadap kapasitas masyarakat untuk mengambil peran secara mandiri. Dengan demikian, praktik peran aktif ini menjadi landasan penting bagi terwujudnya pembangunan lokal berkelanjutan, sebab event yang dilaksanakan bukan hanya bersifat seremonial, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kemandirian ekonomi masyarakat nagari untuk jangka panjang.

Peranan sebagai tokoh direpresentasikan oleh Wali Nagari, perangkat nagari, dan tokoh adat yang menjadi figur sentral dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan triangulasi dari perangkat nagari, KAN, Bundo Kandung, UMKM, pemuda hingga

pengunjung, seluruhnya menyatakan bahwa pemerintah nagari tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi terjun langsung sebagai panutan yang memberikan arahan, motivasi, dan keteladanan dalam setiap kegiatan. Hal ini membuktikan bahwa peran tokoh sebagaimana dijelaskan Soerjono Soekanto (2013, dikutip dalam Mawarni et al., 2024) telah dijalankan secara substantif, karena aktor tidak hanya menempati posisi, tetapi juga menjadi referensi perilaku bagi lingkungannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rauf & Eriyanti, 2019) yang menunjukkan bahwa keberhasilan event budaya di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh tokoh pemerintah nagari dalam membangun kepercayaan (trust) masyarakat.

Peranan sebagai pemimpin tercermin dari kemampuan Pemerintah Nagari Kumango dalam menetapkan keputusan strategis, menyusun pembagian tugas secara sistematis, serta memastikan seluruh elemen masyarakat bergerak pada alur yang sama. Tidak hanya Wali Nagari, tetapi juga Sekretaris, Kasi, Kaur, hingga Kepala Jorong menjalankan fungsi kepemimpinan sesuai bidangnya masing-masing. Pola kepemimpinan kolektif ini sesuai dengan konsep Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008), di mana kekuasaan tidak terpusat pada satu aktor, tetapi didistribusikan secara adaptif untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program. Pola ini mengonfirmasi hasil penelitian (Moreta & Harirah MS, 2023) bahwa pelibatan multi aktor dalam struktur kepemimpinan lokal dapat meningkatkan efisiensi koordinasi dalam event berbasis komunitas.

Peranan dalam sosialisasi dan edukasi menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat terhadap nilai dan tujuan dari penyelenggaraan Baluluak Bajarami. Pemerintah Nagari Kumango tidak hanya mengandalkan mekanisme formal seperti rapat dan musyawarah, tetapi juga memanfaatkan pendekatan informal melalui langsung dari mulut ke mulut, media sosial, hingga pertemuan adat. Strategi ini mencerminkan di mana masyarakat tidak hanya diperintah untuk ikut serta, tetapi diberi pemahaman mengenai alasan mereka perlu terlibat. Temuan ini relevan dengan pemberdayaan tidak hanya terjadi melalui pelibatan fisik, tetapi juga melalui penyadaran. Hasil ini sejalan pula dengan penelitian (Rauf & Eriyanti, 2019) yang menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan event budaya di nagari lain sangat ditentukan oleh efektivitas edukasi sosial sebelum kegiatan berlangsung.

Selanjutnya, peranan dalam mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau seluruh tahapan event menunjukkan bahwa pemerintah nagari tidak hanya aktif pada tahap perencanaan, tetapi juga hadir secara konsisten hingga pelaksanaan dan evaluasi. Pembagian tugas yang jelas, mekanisme monitoring yang berjalan, serta kemampuan mengatasi kendala di lapangan menunjukkan pelaksanaan fungsi manajerial yang baik. Kolaborasi dengan tokoh adat, Bundo Kanduang, UMKM, serta pemuda menunjukkan bahwa

Pemerintah Nagari mampu menjalankan peran yang menyatukan berbagai aktor dalam satu visi bersama, sebagaimana dalam teori Collaborative Governance. Kondisi ini memperlihatkan bahwa event tidak hanya dikelola secara struktural, tetapi juga secara partisipatif dan berkelanjutan, sebagaimana prinsip pembangunan lokal berkelanjutan yang menekankan dimensi sosial, budaya, dan ekonomi secara simultan. Penemuan ini menguatkan penelitian (Moreta & Harirah MS, 2023) yang menyebutkan bahwa keberhasilan program berbasis budaya hanya mungkin terjadi apabila pemerintah lokal berfungsi sebagai pengendali sekaligus kolaborator.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktif Pemerintah Nagari Kumango berada pada tingkat yang tinggi dan berjalan secara kolaboratif dan komunikatif. Pemerintah nagari tidak hanya bertindak sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai inspirator, motivator, fasilitator, dan pengendali utama keberhasilan event Baluluak Bajarami. Hal ini membuktikan bahwa implementasi Program Unggulan Bupati Satu Nagari Satu Event tidak akan berhasil hanya dengan instruksi struktural dari atas (top-down), tetapi membutuhkan keterlibatan nyata dari pemerintah nagari sebagai aktor lokal yang memahami dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian, peran aktif ini dapat dikatakan sebagai representasi harmonis antara teori peran Soerjono Soekanto (2013, dikutip dalam Mawarni et al., 2024), teori collaborative governance, teori pemberdayaan masyarakat, dan prinsip pembangunan lokal berkelanjutan dalam satu praktik sosial yang saling menguatkan.

Peran Partisipatif

Berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2013, dikutip dalam Mawarni et al., 2024), peran partisipatif merupakan bentuk keterlibatan yang bersifat kolaboratif antara aktor utama (pemerintah) dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Nagari Kumango tidak hanya bertindak sebagai pengarah atau pelaksana utama, tetapi juga sebagai mitra yang bekerja bersama masyarakat dalam mensukseskan event Baluluak Bajarami sebagai implementasi Program Unggulan Bupati Satu Nagari Satu Event. Pola relasi yang dibangun menunjukkan adanya praktik Collaborative Governance sebagaimana dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008), di mana pemerintah dan masyarakat berinteraksi dalam posisi setara untuk menghasilkan kebijakan atau kegiatan bersama. Selain itu, partisipasi masyarakat yang terus tumbuh memperlihatkan adanya proses pemberdayaan masyarakat, di mana pemerintah memberikan ruang, akses, dan pengakuan terhadap kapasitas warga untuk mengambil peran secara mandiri. Dengan demikian, pola peran partisipatif yang dijalankan turut mendukung prinsip pembangunan lokal

berkelanjutan, karena tidak hanya berorientasi pada keberhasilan event, tetapi juga pada penguatan kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat nagari secara jangka panjang.

Pertama, pada indikator SDM (Sumber Daya Manusia), hasil triangulasi menunjukkan bahwa pemerintah nagari mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat mulai dari niniak mamak, bundo kanduang, pemuda, tokoh adat hingga pelaku UMKM untuk terlibat sesuai kapasitas masing-masing. Wali Nagari bersama perangkatnya tidak memonopoli pekerjaan, melainkan mendistribusikan peran secara proporsional. Kepala jorong bertanggung jawab mengkoordinasikan masyarakat di wilayahnya, kaur dan kasi membantu dalam administrasi dan teknis lapangan, sementara UMKM dan pemuda diberi ruang untuk mengambil peran dalam kegiatan ekonomi dan operasional lapangan. Hal ini mencerminkan di mana event tidak hanya menjadi milik pemerintah, tetapi benar-benar menjadi milik bersama masyarakat nagari. Temuan ini sejalan dengan (Moreta & Harirah MS, 2023) yang menunjukkan bahwa distribusi peran berbasis komunitas mampu meningkatkan partisipasi kolektif dalam penyelenggaraan event budaya di tingkat nagari.

Kedua, pada aspek dukungan material, pemerintah nagari menjalankan peran sebagai pengelola sekaligus penghubung sumber daya. Penyediaan tenda, panggung, perlengkapan kebersihan, konsumsi hingga fasilitas dokumentasi dilakukan melalui gabungan skema anggaran nagari dan kontribusi swadaya masyarakat, tokoh lokal, serta pelaku usaha. Cara kerja ini menunjukkan adanya nilai gotong royong ke dalam sistem collaborative. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam teori pemberdayaan masyarakat bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sumber daya akan meningkatkan rasa memiliki terhadap program. Kondisi ini juga mengonfirmasi temuan (Rauf & Eriyanti, 2019) bahwa fleksibilitas sumber daya yang bersifat terbuka dan kolektif menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan event sosial berbasis komunitas.

Ketiga, indikator waktu menunjukkan bahwa partisipasi dalam event tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional dan berbasis komitmen. Wali Nagari dan perangkatnya secara konsisten hadir pada berbagai rapat, pendampingan hingga pengawasan lapangan, bahkan di luar jam kerja formal. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga menunjukkan kesediaan meluangkan waktu mengikuti persiapan, gotong royong, hingga mendampingi pelaksanaan acara tanpa harus diminta secara formal. Hal ini memperlihatkan adanya sense of belonging yang kuat terhadap event Baluluak Bajarami, sehingga masyarakat tidak merasa dibebani dalam event, tetapi justru merasa memiliki. Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Ansell & Gash, 2008) bahwa kolaborasi yang berhasil ditandai dengan munculnya komitmen emosional dari para aktor melalui interaksi yang intens dan setara dalam ruang publik.

Keempat, tingkat partisipasi masyarakat dalam event tergolong sangat tinggi. Keterlibatan muncul tidak hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak perencanaan hingga pasca acara. Banyak masyarakat yang membantu tanpa penugasan langsung, seperti persiapan event, menyiapkan hidangan untuk tamu, menjaga kebersihan lokasi acara, hingga menyambut pengunjung dari nagari lain. Bentuk partisipasi spontan seperti ini menunjukkan bahwa event telah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat. Temuan ini menguatkan konsep pembangunan lokal berkelanjutan yang menekankan bahwa keberhasilan suatu program hanya akan bertahan lama apabila tertanam dalam budaya dan nilai hidup masyarakat lokal (Sharples, 2020). Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Rauf & Eriyanti, 2019) yang menemukan bahwa keberlangsungan event budaya di tingkat nagari sangat ditentukan oleh seberapa jauh program tersebut dianggap sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pola peran partisipatif yang dijalankan Pemerintah Nagari Kumango bersifat kolaboratif, inklusif, dan memberdayakan. Pemerintah tidak menempatkan diri sebagai satu-satunya aktor utama, tetapi menciptakan ruang interaksi yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara wajar dan proporsional. Temuan ini mengonfirmasi konsep *commitment to process* yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu program publik akan lebih kuat apabila dikelola melalui kerja bersama (*co-creation*), bukan hanya kerja pemerintah semata (Ansell & Gash, 2008). Dengan demikian, peran partisipatif ini menjadi penopang penting bagi keberhasilan Program Satu Nagari Satu Event, karena menjadikan event bukan hanya sebagai kegiatan seremonial tahunan, tetapi sebagai wadah konsolidasi sosial dan penguatan kohesi masyarakat nagari secara berkelanjutan.

Peran Pasif

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Nagari Kumango menjalankan bentuk peran pasif dalam pelaksanaan Program Unggulan Bupati Satu Nagari Satu Event, khususnya pada kegiatan Baluluak Bajarami. Peran pasif ini sesuai dengan konsep peran menurut Soerjono Soekanto (2013, dikutip dalam Mawarni et al., 2024), yang mendefinisikannya sebagai bentuk dukungan tidak langsung dari pihak yang memiliki kewenangan melalui pemberian kesempatan kepada pihak lain untuk bertindak sesuai kapasitasnya. Dalam konteks ini, pemerintah nagari tidak mengambil alih seluruh kendali pelaksanaan kegiatan, tetapi memberikan keleluasaan kepada masyarakat, pemuda, tokoh adat, dan pelaku UMKM untuk berinisiatif serta mengambil bagian sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan event. Dengan demikian, pemerintah lebih berfungsi sebagai fasilitator, penyedia dukungan administratif, dan pengawas agar arah kegiatan tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Sikap menghargai inisiatif masyarakat tercermin dari keterbukaan pemerintah terhadap ide dan gagasan yang disampaikan oleh berbagai unsur masyarakat. Setiap usulan yang muncul tidak hanya didengar, tetapi juga diapresiasi dan, sejauh memungkinkan, diakomodasi dalam pelaksanaan event. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah nagari tidak bersifat top-down, melainkan membuka ruang partisipasi berbasis bottom-up initiative. Model seperti ini sejalan dengan pandangan (Ansell & Gash, 2008) mengenai shared understanding, yaitu partisipasi yang tumbuh melalui dorongan fasilitatif dari pemerintah tanpa dominasi langsung. Selain itu, pemerintah menunjukkan keterbukaan melalui penyediaan forum musyawarah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat sebelum kebijakan diambil. Proses diskusi seperti ini memperlihatkan adanya mekanisme pengambilan keputusan. Penghargaan terhadap pendapat masyarakat tidak hanya tampak dari kesediaan menerima usulan, tetapi juga dari cara pemerintah menanggapi setiap saran dengan bijak. Meskipun tidak semua pendapat dapat diterapkan, pemerintah selalu berupaya memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Dalam perspektif Collaborative Governance (Emerson et al., 2012), pola peran pasif yang dijalankan Pemerintah Nagari Kumango mencerminkan bentuk facilitative collaboration, yakni pemerintah berperan sebagai penjaga proses (process guardian) yang memastikan kolaborasi tetap berjalan, bukan sebagai pengendali utama. Posisi ini efektif dalam membangun rasa percaya (trust-building) dan memperkuat komunikasi inklusif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, mekanisme yang lebih kuat dalam pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar aktor dan dapat disimpulkan bahwa peran pasif Pemerintah Nagari Kumango telah berhasil mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat secara mandiri. Pemerintah menunjukkan kepercayaan kepada masyarakat sebagai motor utama kegiatan, sekaligus menjaga agar pelaksanaan event tetap sesuai jalur.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Nagari dalam Mensukseskan Program Unggulan Bupati Satu Nagari Satu Event Studi Kasus Baluluak Bajarami di Nagari Kumango?

Faktor pendukung merupakan kondisi, sumber daya, atau situasi yang mempermudah pemerintah nagari untuk menjalankan perannya secara efektif. Sebaliknya, faktor penghambat adalah kondisi atau kendala yang menghalangi optimalisasi peran pemerintah nagari dalam mensukseskan program. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung dan penghambat dapat diuraikan sebagai berikut:

1). Faktor Pendukung

Salah satu dukungan terbesar berasal dari tingginya partisipasi seluruh elemen masyarakat, terutama dari tokoh adat, Bundo anduang, UMKM, kalangan pemuda, dan pengunjung. Hal ini diungkapkan oleh Iis Zamora P, S.Pd. NL.P, selaku Wali Nagari Kumango: *“Untuk menjalankan kita sebagai wali nagari untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat kita harus berpegang dulu bahwasanya pemerintah nagari tanpa dukungan masyarakat. Kalau dari kami pemerintah nagari, yang paling membantu seluruh elemen masyarakat, lembaga unsur baik lembaga unsur pemuda, alim ulama, bundo kanduang, cadiak pandai, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya termasuk tokoh-tokoh adat. Banyak anak muda dan kelompok adat yang langsung turun tangan.”*

Selain dukungan internal nagari, faktor eksternal berupa kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga turut memperkuat pelaksanaan event. Menurut Leni Kemala Sari selaku Sekretaris Nagari:

“Adanya program Satu Nagari Satu Event dari bupati itu membuat kami punya pegangan yang jelas. Jadi kami lebih percaya untuk melaksanakan kegiatan ini dan saling kerjasama dan mencari solusi. Musyawarah bersama, komunikasi yang baik. Jika ada kendala rapat koordinasi atau rapat musyawarah.”

Putri Rahmi Novriani selaku Kaur TU & Umum menambahkan:

“Kerja sama berbagai unsur masyarakat dalam penyelenggaraan Event Baluluak Bajarami.”

Senada dengan itu, Taufik Hidayat selaku Kepala Jorong Kumango Utara menyatakan:

“respon masyarakat sangat positif membangkitkan semangat nagari. Masyarakat sendiri pun muncul dan pemerintah nagari. Perencanaan dan persiapan turut hadir. Masyarakat swadaya ikut dan muncul pihak masyarakat muncul sendiri dan partisipasi masyarakat tinggi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan daerah memberikan legitimasi struktural sekaligus modal administratif bagi pemerintah nagari. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat menegaskan adanya legitimasi sosial yang memperkuat peran partisipatif pemerintah.

Dukungan juga datang dari sinergi antarlembaga nagari, terutama Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Bundo Kanduang. Erizon dari KAN menegaskan:

“Karena kegiatan ini membawa unsur budaya, tentu adat harus ikut mengawal. Pemerintah nagari tidak berjalan sendiri, tapi duduk bersama dulu dengan musyawarah kami di KAN. Semua keputusan diambil secara mufakat mengajak dan menghimbau masyarakat. Masyarakat bersedia gotong royong dan turun tangan dan berkontribusi dalam acara tersebut.”

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan event tidak bersifat top-down, tetapi dijalankan secara deliberatif sesuai sistem adat Minangkabau.

Fitri Yeni dari Bundo Kanduang juga menyatakan:

“Bundo membantu di bagian konsumsi dan penyambutan tamu. Pemerintah nagari tidak mendominasi, tapi meminta kami terlibat sesuai peran kami sebagai Bundo Kanduang. Itu bagian dari penghargaan terhadap adat.”

Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan perempuan adat tidak sekadar simbolis, tetapi dihargai sesuai struktur sosialnya.

Dari kalangan pemuda, Muhammad Hafis, S.H menyampaikan:

“Kami dari pemuda tidak menunggu diperintah. Begitu ada pengumuman event Baluluak Bajarami, kami langsung musyawarah dan ikut terlibat, bentuk kelompok, dan sampaikan ke wali nagari apa yang dilaksanakan. Pemerintah nagari juga memberi kepercayaan.”

Jimmi Oktaviano selaku pemuda menambahkan:

“Kalau dari kami selaku pemuda Nagari Kumango. Kami ikut membantu dari persiapan sampai hari pelaksanaan. Misalnya di bagian dekorasi, kebersihan, dan pengamanan acara. Pemerintah nagari juga terbuka dan mendengar ide kami, jadi kami merasa dihargai.”

Hal ini membuktikan bahwa pelibatan pemuda tidak hanya formal, tetapi nyata dan berbasis kepercayaan.

Dukungan sektor ekonomi juga tampak dari pelaku UMKM. Menurut Citra, S.E:

“Event Baluluak Bajarami membuka peluang. Pemerintah nagari mengizinkan kami berjualan di lokasi acara dan membantu dalam perizinan. Penjualan waktu acara meningkat karena banyak pengunjung yang datang.”

Salah satu pengunjung, Farah Atika, S.E, mengungkapkan:

“Cukup jelas, melihat bagaimana panitia acara menginstruksikan rangkaian acara & tugas masing-masing peserta. ya beberapa kali rapat kami mengutamakan keputusan hasil di musyawarah dan mufakat. Saya saja malahan kepercayaan dilimpahkan penuh kepada masyarakat, karena acara ini diadakan dari masyarakat untuk masyarakat kepada masyarakat.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa respons positif pengunjung ikut memperkuat keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

2). Faktor Penghambat

Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Wali Nagari, Iis Zamora P, S.Pd. NL.P, menyatakan:

“yang kedua, keuangan di lapangan ada-ada saja yang memang membutuhkan uang , terkadang kita sudah merencanakan, tetapi di lapangan bisa lebih. Tantangan kita berpikir bagaimana menanggulangi yang kurang itu. Misalnya sudah menganggarkan sekian ternyata di lapangan terkendala penghitungan awal dan musyawarah dengan perantau dan meminimalisir kesalahan pemahaman antar masyarakat. Wajib sering-sering buat musyawarah.”

Senada dengan itu, Leni Kelama Sari, ST selaku Sekretaris Nagari Kumango menyebutkan:

“Kesulitan yaitu rab pelaksanaan belanja tidak sesuai dengan kode rekening. Tidak boleh belanja dari keluar dari RAB. Pelaporan.”

Hal serupa dengan Fitri Dewi selaku Kaur Keuangan:

“banyaknya pengeluaran terduga (sumbangan proposal dan dana perantau).”

Kepala Seksi Pelayanan menyatakan, Meli Aniza, menambahkan:

“dari masyarakat tantangan seperti ini, ada yang menanyakan bagaimana atau berapa anggaran untuk event, seperti itu”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat juga menuntut transparansi anggaran, yang merupakan bagian dari prinsip model trust building.

Kepala Urusan Perencanaan, Tika Yuliana, S.Si menegaskan:

“yang jelas itu manajemen anggaran kita mengadakan kadang ada tidak sesuai anggaran.”

Hal serupa ditegaskan oleh KAN, Erizon:

“Tantangan yang namanya biaya kita kecil itu yang tahun kedua ya tantangan, terlalu banyak masalahnya dana kita termasuk biaya konsumsi masyarakat itu kebetulan ada sumbangan dari rantau itulah yang dipakai untuk acara konsumsi dan segala macam. Harapan kalau seandainya akan diadakan lagi pemerintah nagari kumango, untuk pemerintah kabupaten tolong dana disiapkan, jangan dana itu dibebankan kepada desa atau nagari yang diadakan soalnya tidak terpikul.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi anggaran berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas perencanaan, khususnya dalam aspek manajemen keuangan, agar penggunaan dana lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan. Kendala ini menggambarkan bahwa meskipun dukungan kebijakan tersedia, implementasinya masih membutuhkan kreativitas pendanaan dan negosiasi sosial. Program budaya sering kali

dihadapkan pada logika ekonomi, sehingga membutuhkan pembenahan strategi komunikasi untuk menarik sponsor. Untuk menggambarkan kondisi tersebut, berikut disajikan data mengenai rencana dan realisasi anggaran penyelenggaraan event Baluluak Bajarami dalam dua tahun terakhir:

Tabel 1. Realisasi Anggaran APBN Program Satu Nagari Satu Event
Baluluak Bajarami di Nagari Kumango.

Tahun	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
2022	37.912.000	37.856.800
2023	85.999.000	82.998.925

Sumber: Dokumen APBN Nagari Kumango Tahun 2022-2023

Data anggaran menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran selalu mendekati rencana, namun kebutuhan di lapangan sering kali melebihi perhitungan awal. Dengan demikian, keterbatasan anggaran bukan hanya soal jumlah dana, tetapi juga soal fleksibilitas manajemen keuangan. Kesenjangan antara kebutuhan lapangan dan anggaran formal akhirnya ditutupi oleh sumbangan perantau serta swadaya masyarakat, yang menunjukkan bahwa dukungan sosial menjadi instrumen utama dalam menutupi kelemahan struktural anggaran. Berdasarkan teori peran Soerjono Soekanto (2013, dikutip dalam Mawarni et al., 2024), keberhasilan pelaksanaan suatu fungsi sosial bergantung pada kemampuan aktor dalam menjalankan peran aktif, partisipatif, dan pasif secara seimbang. Pada kasus Baluluak Bajarami, pemerintah nagari telah menunjukkan peran aktif melalui sosialisasi dan fasilitasi, serta peran partisipatif melalui kerja sama lintas unsur adat dan pemuda. Namun beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan anggaran. Dengan demikian, penguatan peran pemerintah nagari tidak hanya diperlukan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap perencanaan dan evaluasi agar program dapat berjalan lebih berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Nagari dalam Mensukseskan Program Unggulan Satu Nagari Satu Event Studi Kasus Baluluak Bajarami di Nagari Kumango, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Peran aktif Pemerintah Nagari Kumango tergolong cukup baik, yang terlihat melalui keterlibatan dalam sosialisasi, edukasi, dan koordinasi pelaksanaan event Baluluak Bajarami. Pemerintah Nagari telah berupaya menyampaikan informasi kepada masyarakat serta menjalin komunikasi dengan berbagai pihak pendukung.

Peran partisipatif Pemerintah Nagari Kumango juga berjalan cukup efektif, ditunjukkan melalui keterlibatan langsung dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan bersama perangkat nagari, kelompok pemuda, dan unsur adat.

Peran pasif Pemerintah Nagari Kumango tampak melalui dukungan fasilitas dan pemberian izin kegiatan, yang menjadi bentuk legitimasi terhadap penyelenggaraan event. Meski demikian, dukungan tidak langsung ini belum diiringi dengan kebijakan penguatan kelembagaan untuk keberlanjutan program.

Faktor pendukung utama keberhasilan event meliputi tingginya nilai budaya lokal Baluluak Bajarami, antusiasme sebagian masyarakat, serta adanya kerja sama dari perantau dan unsur pemerintah kabupaten.

Faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran. Pemerintah Nagari perlu meningkatkan dukungan anggaran melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, pihak swasta, sponsor lokal, atau lembaga pendanaan lainnya agar kegiatan dapat terlaksana secara maksimal.

Secara umum, peran Pemerintah Nagari dalam mensukseskan Program Satu Nagari Satu Event dapat dikategorikan cukup berhasil, namun memerlukan penguatan kelembagaan dan strategi keberlanjutan agar pelaksanaan event berikutnya semakin optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa rekomendasi penting bagi pihak-pihak terkait agar pelaksanaan Program Unggulan Satu Nagari Satu Event di Nagari Kumango dapat berlangsung lebih optimal, terarah, dan berkelanjutan.

Pemerintah Nagari Kumango

Pemerintah Nagari diharapkan meningkatkan kualitas tata kelola event melalui penyusunan perencanaan yang lebih sistematis dan berbasis data. Sosialisasi dan pelibatan masyarakat perlu diperluas secara merata, tidak hanya kepada kelompok tertentu, agar seluruh unsur masyarakat memiliki akses informasi dan kesempatan berpartisipasi yang sama. Selain itu, pemerintah nagari perlu memperkuat kapasitas panitia lokal, terutama dalam hal manajemen event, promosi digital, dan dokumentasi kegiatan. Dengan pendekatan ini, event Baluluak Bajarami tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi dapat berfungsi sebagai instrumen strategis untuk penguatan ekonomi masyarakat dan pelestarian identitas budaya lokal.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Pemerintah kabupaten disarankan meningkatkan pendampingan teknis dan supervisi secara berkelanjutan, terutama terkait standar penyelenggaraan event, tata kelola anggaran, serta manajemen pariwisata berbasis komunitas. Dukungan anggaran juga perlu dibuat lebih

terarah dan konsisten, agar penyelenggaraan event memiliki kualitas yang stabil setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah kabupaten dapat memperluas jaringan promosi melalui kolaborasi dengan media, komunitas kreatif, atau dinas pariwisata provinsi guna meningkatkan daya tarik event dan memperluas cakupan pengunjung.

Masyarakat dan Pemangku Adat

Masyarakat dan pemangku adat diharapkan memperkuat rasa memiliki terhadap event Baluluak Bajarami dengan terlibat aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Masyarakat juga perlu lebih proaktif memanfaatkan peluang ekonomi seperti pengembangan produk UMKM, layanan kuliner, jasa transportasi lokal, hingga penyediaan homestay berbasis budaya. Peran pemangku adat tetap krusial dalam menjaga nilai-nilai tradisional agar event tidak kehilangan identitas lokalnya. Keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci keberlanjutan event dalam jangka panjang.

Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian, baik dari segi lokasi maupun pendekatan penelitian. Peneliti berikutnya dapat mengkaji perbandingan antara beberapa nagari pelaksana Program Satu Nagari Satu Event untuk melihat variasi pola peran dan dampaknya. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat menggunakan metode kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur dampak ekonomi, sosial, dan budaya secara lebih terukur. Peneliti selanjutnya juga dapat memperdalam aspek kolaborasi antar aktor, terutama antara pemerintah nagari, komunitas pemuda, pelaku UMKM, dan pemerintah kabupaten untuk melihat sejauh mana model tata kelola yang terbentuk mampu mendukung keberlanjutan event.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2022). Ternyata ini makna dan filosofi Baluluak Bajarami. Bakaba.Net. <https://bakaba.net/ternyata-ini-makna-dan-filosofi-baluluak-bajarami/>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008a). Collaborative governance in theory. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008b). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1271032
- Aydini, R., & Syafril, R. (2024). Implementasi program satu nagari satu event (SNSE) sebagai program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam melestarikan kebudayaan lokal Minangkabau. *Jurnal Administrasi Negara*, 12, 1–10.

- Bagian Humas dan Protokol. (2023). Festival Baluluak Bajarami dibuka, Bupati Eka Putra ikut manyabik dan mairiak padi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. <https://tanahdatar.go.id/berita/festival-baluluak-bajarami-di-buka-bupati-eka-putra-ikut-manyabik-dan-mairiak-padi>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Inang. (2024). Bupati Tanah Datar: Program satu nagari satu event berikan multiplier effect. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2024/02/07/152318078/bupati-tanah-datar-program-satu-nagari-satu-event-berikan-multiplier-effect>
- Indry, & Ningsih, Y. (2023). Peran perantau dalam pembangunan nagari perspektif collaborative governance (literature review). *Journal of Public Administration and Management Studies*, 1(1), 18–24.
- Kurniawan, C. C., Gaol, N. C. L., Putri, S. N., & Prianto, Y. (2021). Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan kearifan lokal Ulup Doyo. *Prosiding Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara*, 913–918.
- Mawarni, Raudah, S., & Budiman, A. (2024). Peran bidang teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi, dan hubungan masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal MASDM*, 1, 115–123.
- Moreta, A., & Harirah MS, Z. (2023). Collaborative governance dalam pengembangan desa wisata Nagari Tuo Pariangan tahun 2021–2022. *Journal of Social and Policy Issues*, 3(3), 106–112. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.180>
- Najamudin, F., & Fajar, A. H. Al. (2024). Pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan ABCD untuk mencapai SDG 1: Tanpa kemiskinan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 142–158. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.58936>
- Olivia, R. (2024). Strategi komunikasi pemerintah Nagari Pangian dalam mensosialisasikan program satu nagari satu event di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2022 tentang roadmap pelaksanaan program unggulan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021–2026. (2022).
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah nagari. (2018).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang kesejahteraan sosial Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mobuya, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.

- Rauf, A., & Eriyanti, F. (2019). Pemberdayaan masyarakat Nagari Sijunjung melalui pemanfaatan rumah gadang sebagai tempat penginapan wisatawan Geopark Silokek. *Jurnal Perspektif*, 2(3), 172–180. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.86>
- Rosika, C., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi dan inovasi pemerintah: Membangun model pemerintahan lokal yang berkelanjutan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(8), 3037–3049. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1111>
- Sharpley, R. (2020). Tourism, sustainable development and the theoretical divide: 20 years on. *Journal of Sustainable Tourism*. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1779732>
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi: Suatu pengantar* (49th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (27th ed.). Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. (2009).